

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menetapkan pagu Dana Desa (DD) tahun 2022, sebesar 68 triliun rupiah. Dana Desa ini disalurkan untuk 74.961 desa di 434 kabupaten atau kota. Jumlah tersebut naik sebesar 4 triliun, dibandingkan dengan pagu DD tahun lalu yaitu sebesar 64 triliun rupiah. Pembangunan fasilitas desa yang dilaksanakan, diperoleh dari penggunaan Dana Desa (DD). Contoh jalan desa, irigasi, jembatan, air bersih, pasar desa, sumur dan drainase. Pembangunan ini merupakan penegasan dari komitmen pemimpin atau presiden Indonesia dalam membangun daerah pinggiran, desa dan perbatasan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan fasilitas skala kecil yang dibutuhkan masyarakat bertujuan membantu perekonomian yang sedang berjalan. Pembangunan itu tidak hanya terjadi di lapangan terbang, pelabuhan maupun jalan tol. Tujuan preferensi penggunaan Dana Desa (DD) ini digunakan untuk pemulihan ekonomi dan

sektor-sektor ekonomi. Tujuan utama tersebut mempercepat pembangunan atau pemberdayaan masyarakat.¹

Lokasi desa Geger di terbis Gunung Wilis di wilayah Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Lingkungan kapling di Desa Geger yang subur mendukung pertanian untuk produktif. Mata pencaharian penduduk desa yaitu peternak sapi perah. Adapun masyarakat desa yang membantu warga lain dalam beternak sapi perah dan menerapkan sistem bagi hasil. Kondisi pemerintahan Desa Geger yaitu dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, kasi pelayanan, operator desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan orang Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM), serta ketua RW (Rukun Warga) dan ketua RT (Rukun Tangga).

Pemerintah desa memiliki tugas pokok dalam strategi yang dikhususkan untuk masyarakat desa, termasuk dengan pengelolaan keuangan. Aktualisasi sebuah aktivitas yang dibuat oleh pemerintah Desa Geger terdapat beberapa problematika. Regulasi perubahan peraturan yang berubah mengakibatkan pemerintah desa mengalami persoalan yaitu harus mempelajari kembali terkait peraturan baru. Selain itu, pengelompokan staf kerja yang tidak seimbang mengakibatkan beberapa pekerjaan dan kegiatan menjadi terbengkalai.

¹ Ditjen Perbendaharaan KEMENKEU RI KPPN AMBON, "Pagu Dana Desa Tahun 2022" https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/ambon/id/data-publikasi/berita-terbaru/28_34-pagu-dana-desa-tahun-2022.html, (diakses pada 10 september 2022 pukul 10.12 WIB).

Berikut ini merupakan data penyaluran dana desa dalam bentuk persentase pada tahun 2022:

Tabel 1.1 Data Penyerapan Dana Desa Tahun 2022

KETERANGAN	PENYERAPAN (%)
Gedung RT 003/002 Dusun Tumpakpring	7,26
Jalan Rabat RT 002/001 Dusun Turi	10,89
Jalan Rabat RT 001/002 Dusun Turi	5,44
Jalan Rabat RT 002/001 Dusun Tambibendo	10,89
Pelatihan Peternakan Dan Ternak Kambing	1,35
Pelatihan Petani Dan Sayur	0,49
Jalan Usaha Tani RT 001/002	3,66
PKT Pertanian	0,48
BLT Dana desa	40,15
PMT Balita, Lansia (Balita 319 Anak + Lansia 56 Orang)	1,48
PMT Stunting (8 anak)	0,06
Pemutakhiran SDGs	0,33
Pengelolaan Rumah Desa Sehat (RDS)	0,12
Web Desa	0,1
Honor KPM	0,16
Publikasi, Operator Desa dan Kalender	4,49
Pelatihan Pengiriman Peserta (BPD, Siskuides, Sipades, Rumah Desa Sehat, dan Bumdes)	0,4
Musdes, Rembuk Stunting, Muspadi, Musrenbang Desa, Musyawarah RKP	1,45
Penyertaan Modal Bumdes	0,66
PPKM	8

KETERANGAN	PENYERAPAN (%)
Admin PKK	0,82
Budaya Desa (Upacara Adat Dan Agama)	1,32
JUMLAH	100

Sumber : Data Rekapitulasi Dana Desa Tahun 2022

Tabel 1.1 menjelaskan tentang penyerapan Dana Desa pada tahun 2022. Pemerintahan Desa Geger pada Dana Desa yang dianggarkan sesuai dengan keterangan, telah terserap 100%. Dana tersebut disalurkan pemerintahan desa, sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Pada keterangan pertama, Gedung RT 003/001 dengan penyerapan 7,26%. Gedung ini bersebelahan dengan SDN 1 Geger, yang digunakan untuk gedung serbaguna yang dimanfaatkan oleh karang taruna dan masyarakat desa. Keterangan yang kedua yaitu jalan rabat RT 002/001 Dusun Turi dengan penyerapan 10,89% dan 5,44%. Jalan di dusun turi RT002/001 dan RT 001/002 mengalami kerusakan cukup parah, sehingga jalan tersebut diperbaiki agar masyarakat desa dapat menjalankan kegiatan ekonominya. Di dusun tersebut kondisi ekonomi masyarakat tergolong cukup dengan mata pencahariannya sebagai petani sayur dan peternak sapi perah. Begitu juga dengan jalan rabat RT 002/001, sebelum dilaksanakannya rabat jalan, kondisi jalan pada dusun ini termasuk jalan berbatu. Pelatihan dan ternak kambing dengan penyerapan 1,35%. Pelatihan ini bertujuan untuk masyarakat

desa Geger terutama dalam hal peternakan kambing yang masih minoritas, agar peternakan tersebut bisa berkembang seperti sapi perah. Pelatihan petani dan sayur dengan penyerapan 0,49%. Pelatihan ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan produktivitas perkebunan sayur. Kegiatan ekonomi selain peternakan, terdapat perkebunan berupa sayur sehingga diadakan pelatihan ini untuk meningkatkan produktivitas dan perawatan pada tanaman sayur. PKT pertanian dengan penyerapan 0,48%. PKT pertanian yaitu pemberian Pupuk Kalimantan Timur (PKT), pupuk ini disalurkan untuk masyarakat guna menyuburkan tanaman. PMT (Pemberian Makanan Tambahan) balita, lansia dengan penyerapan 1,48%. PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang disalurkan pada posyandu balita dan lansia. PMT *stunting* dengan penyerapan 0,06%. Pemberian makanan tambahan pada anak yang mengalami kekurangan gizi dan gagal tumbuh, sama halnya dengan PMT balita dan lansia yang diberikan pada kegiatan posyandu. Pemutakhiran SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan penyerapan 0,33%. Pengelolaan Rumah Desa Sehat (RDS) dengan penyerapan 0.12%. Rumah Desa Sehat ini bertujuan untuk pusat literasi tentang kesehatan pada desa dan pusat penyebaran informasi pada bidang kesehatan. Web desa dengan penyerapan 0,1%. Web desa ini bertujuan untuk menyebarkan informasi melalui jaringan internet sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi

desa Geger. Honor KPM dengan penyerapan 0,16%, KPM (Kader Pembangunan Manusia) berfungsi untuk membantu pemerintahan desa dengan memfasilitasi dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa. Publikasi, operator desa dan kalender dengan penyerapan 4,49%. Publikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi desa Geger dan adat budaya. Pelatihan pengiriman peserta (BPD, SISKUIDES, SIPADES, rumah sehat, BUMDES) dengan penyerapan 0,4%. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tugas sesuai bidangnya. Musdes, Rembuk *stunting* MUSPADI, MUSRENBANG desa, dan musyawarah RKP dengan penyerapan 1,45%. Penyertaan BUMDES dengan penyerapan 0,66%. Penyertaan modal ini digunakan untuk pengembangan bumdes di desa Geger. PPKM dengan penyerapan 8%. Admin PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dengan penyerapan 0,82%. Budaya desa (upacara adat dan agama) dengan penyerapan 1,32%.

Penyusunan buku berorientasi untuk memahami hambatan atau problematika Pemerintahan Desa terkait mengatur keuangan desa, sehingga pembaca dapat memahami tentang pengelolaan finansial desa, hambatan, dan upaya hambatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, dengan adanya buku yang berjudul

“Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa” dapat digunakan sebagai pemahaman bagi pembaca.

Didalam buku ini berfokus pada problematika pengelolaan keuangan desa. Dimana buku tersebut dapat dijadikan sebagai penambah wawasan bagi para pembaca terkait problematika pengelolaan keuangan desa. Selain itu, buku ini juga membahas terkait kesesuaian hukum pada pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa dan upaya dalam mengatasi hambatan atau problematika oleh Pemerintah Desa.

Berikut manfaat yang diberikan dalam buku ini :

1. Pemerintahan desa

Pembahasan ini diharapkan menjadi gambaran umum terkait mengatur keuangan desa telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku pada sistem pemerintahan desa.

2. Akademik

Gambaran atau wawasan terkait pengelolaan keuangan desa dan berbagai hambatan, serta solusi dan usaha yang dilakukan pemerintah desa terkait mengatasi masalah tersebut.

3. Pembaca

Sebagai penambah pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa dan peraturan yang berlaku, serta berbagai hambatan yang berpeluang terjadi dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa. Sistematika yang digunakan dalam menyusun buku ini antara lain: Akuntansi sektor publik, keuangan desa, akuntansi keuangan desa, serta

pembahasan yaitu, keuangan desa, kesesuaian dasar hukum dan upaya mengatasi hambatan atau problematika. Buku yang berjudul “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa” merupakan buku cetakan pertama yang membahas dari satu obyek pemerintah desa yaitu tentang problematika pengelolaan keuangan desa, dan upaya mengatasi hambatan oleh Pemerintah Desa, kesesuaian hukum yang berlaku, serta penggunaan bahasa mudah dipahami oleh pembaca. Penyusunan buku ini melalui proses pengamatan, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan kondisi Pemerintah Desa dan kondisi ekonomi desa tersebut. Buku ini melalui pemahaman yang jelas berdasarkan realitas sosial yang ada.